

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kashmir yang merupakan negara kepangeranan yang berada di wilayah anak benua india. Kashmir memiliki penduduk mayoritas muslim dan memiliki pemimpin beragama Hindu. Kashmir bergabung dengan India dan diberikan otonomi khusus yang dibentuk selama 5 Bulan yaitu pada bulan Mei-Oktober 1949.

Akibat adanya ketidakpuasan dari masyarakat Kashmir terhadap Pemerintah India menjadikan Kashmir ingin melepaskan diri dari wilayah kesatuan Uni India. kelompok-kelompok separatisme mulai bermunculan di Kashmir yang memiliki tujuan agar Kashmir lepas dari wilayah kesatuan Uni India. Dalam merespon tindakan separatisme yang ada di Kashmir Pemerintah India melakukan tindakan seperti perundingan dengan para pemimpin kelompok separatisme Kashmir serta penggunaan kekuatan militer. Pencabutan otonomi khusus Kashmir merupakan cara Pemerintah India untuk menghapuskan kelompok separatisme yang ada di Kashmir.

Dalam kebijakan pencabutan otonomi khusus Kashmir, Pemerintah India melakukan sekuritisasi terhadap isu separatisme di Kashmir yang dapat mengancam kedaulatan India. Pemerintah India menyatakan bahwa pencabutan otonomi khusus Kashmir merupakan cara untuk menghindari terorisme dan separatisme di Kashmir. Pemerintah India memunculkan isu separatisme pada awal kemenangan Narendra Modi pada tahun 2014 bersama partai BJP.

Pemerintah India yang didukung oleh nasionalis Hindu memainkan isu agama dalam memunculkan isu separatisme yang ada di Kashmir, hal tersebut diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah India yang pro terhadap Nasionalis Hindu yang menjadi mayoritas di India.

Dengan beberapa opini publik yang terbentuk terhadap isu Kashmir, isu ini secara publik dapat dikatakan berbahaya karena dari jejak pendapat Pew Research India mengatakan isu ini penting sehingga perlu adanya tindakan militer dalam menanganinya. Hal tersebut ditambah dari akademisi India yang menganggap Pasal 370 memberikan dampak buruk terhadap India. Oleh karena itu, India melakukan tindakan militernya dengan melihat opini publik yang muncul.

Berdasarkan beberapa opini para elit politik India, artikel 370 merupakan sebuah alat yang digunakan untuk tumbuhnya benih separatisme dan terorisme di Kashmir, dan juga penyebab tidak berlakunya hukum Union of India di Kashmir, serta sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Kashmir. Pencabutan terhadap Artikel 370 merupakan sebuah langkah awal terbukanya pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kashmir, dan sebuah cara untuk memberantas korupsi di Kashmir, serta merupakan langkah awal pembangunan ekonomi di Kashmir. Pencabutan Artikel 370 dianggap sebagai langkah awal untuk membuat Masyarakat Kashmir agar tidak merasa terasing dari India

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat kasus kebijakan pencabutan otonomi Kashmir dari kajian berbeda seperti dampak pencabutan otonomi Kashmir terhadap keamanan, stabilitas politik dan perekonomian India. Selain terdapatnya isu keamanan dalam kebijakan pencabutan otonomi khusus Kashmir, terdapat juga faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan India melakukan pencabutan otonomi khusus Kashmir seperti wilayah Kashmir yang memiliki potensi ekonomi yang bagus sehingga India ingin wilayah Kashmir menjadi bagian dari India secara utuh. Penulis menemukan hambatan dalam penelitian ini salah satunya adalah ketersediaan sumber data mengenai pernyataan Pemerintah India dalam permasalahan Kashmir karena banyak yang telah dihapus oleh *website* resmi Pemerintah India.

